

SARIKAT COMBINATIE MINANGKABAU (S.C.M.) DALAM PERGERAKAN NASIONAL (1919-1922)

SARIKAT COMBINATIE MINANGKABAU (S.C.M.) IN THE NATIONAL MOVEMENT (1919-1922)

¹Yandi Saputra, ²Fikri Surya Pratama

^{1,2}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia
yandisaputrachaniago@gmail.com, fikrisurya28@gmail.com

 10.36869/pjhpish.v9i2.410

Diterima 01-08-2024; direvisi 20-11-2024; disetujui 02-12-2024

ABSTRACT

In the early decades of the 20th century, a number of political organisations emerged within the Minangkabau community, each with their own underlying ideologies. These included Pan Islamism, nationalism, socialism and socialism. Aware of this phenomenon, Djamaluddin Rasjad and his colleagues established the Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.) as a means of uniting these disparate elements. The objective of this article is to elucidate the role of Sarikat Combinatie Minangkabau in the context of the national movement. This study employs a historical research methodology with an emphasis on temporal and processual analysis. The findings of this study demonstrate that the objective of this association was to: reinforce the mutual ties between the various indigenous associations in Minangkabau; promote peace and advocate for the social and customary rights of the Minangkabau people; defend the existence of Minangkabau communal land, which was frequently exploited by the government; address the issue of elections and the right to vote for the Minangkabau people; advocate for the autonomy of Minangkabau; and promote equality regardless of ethnicity or skin colour and eliminate all forms of discrimination. Moreover, under the guidance of Bagindo Zainuddin, S.C.M. persisted in its efforts to facilitate dialogue and collaboration between movement organisations in Minangkabau, adopting a collaborative approach towards the government. However, following the appointment of Soelaiman Effendi, a figure previously associated with Insoelinde, the direction of the organisation shifted towards a more radical stance, which the Dutch government perceived as a threat.

Keywords: colonial; movement; Sarikat Combinatie Minangkabau

ABSTRAK

Pada awal abad ke-20, dalam masyarakat Minangkabau, muncul berbagai organisasi pergerakan politik dengan beragam ideologi yang mendasarinya, antara lain; Pan Islamisme, nasionalisme, sosialisme dan sosialisme. Menyadari fenomena tersebut, maka Djamaluddin Rasjad beserta rekannya membentuk Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.) sebagai jembatan penghubung keragaman ini. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan eksistensi Sarikat Combinatie Minangkabau dalam pergerakan nasional. Studi ini menggunakan metodologi penelitian sejarah dengan menekankan pada waktu dan proses. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan perkumpulan ini adalah: memperkuat ikatan timbal balik antara berbagai perkumpulan pribumi di Minangkabau; mencapai ketentraman dan memperjuangkan hak-hak sosial dan adat rakyat Minangkabau; memperjuangkan eksistensi tanah ulayat Minangkabau yang kerap disalahgunakan oleh pemerintah; persoalan pemilihan umum dan hak pilih masyarakat Minangkabau; persoalan otonomi bagi Minangkabau; serta persamaan kulit putih, coklat serta penghapusan segala perbedaan. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Bagindo Zainuddin, S.C.M. melanjutkan upaya memfasilitasi dialog dan kolaborasi antar organisasi pergerakan di

Minangkabau dan mengadopsi pendekatan kolaboratif terhadap pemerintah. Namun, setelah diangkatnya Soelaiman Effendi, tokoh yang sebelumnya terkait dengan *Insoelinde*, arah organisasi berubah menjadi 'radikal' bagi pemerintah Belanda.

Kata kunci: kolonial; pergerakan; Sarikat Combinatie Minangkabau

PENDAHULUAN

Memasuki abad ke-20 menjadi saksi munculnya perkembangan baru dalam politik Belanda di Indonesia. Kemunculan ideologi politik baru didasari oleh cita-cita untuk mempercepat kemajuan bangsa Indonesia. Orientasi politik baru ini dikenal dengan istilah "politik etis". Gerakan politik etis mengajak bangsa Indonesia untuk mengejar kemajuan dengan tetap berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Tahap awal dilakukan dengan akuntabilitas penuh, dimana Belanda menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan penduduk asli dan memberikan bantuan selama masa-masa sulit. Meskipun dalam praktiknya, kebijakan politik yang beretika tidak serta merta membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun kebijakan tersebut mampu membawa perubahan pada seluruh tatanan kehidupan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan meluasnya penerapan sistem irigasi dan semakin akrabnya sistem pertanian dan perkebunan modern. Praktek migrasi atau transmigrasi dimana individu direlokasi dari Pulau Jawa memberikan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang positif.

Salah satu dampak politik etis yang paling signifikan adalah pembentukan program pendidikan. Penyediaan pendidikan bagi masyarakat Indonesia mempunyai potensi untuk memfasilitasi perubahan dalam pemikiran mereka, memungkinkan mereka untuk mengadopsi pandangan yang lebih maju dan untuk mencapai kemerdekaan melalui cara-cara non-kekerasan, dibandingkan dengan perang yang menjadi ciri khas masa lalu. Bidang pendidikan terbukti bermanfaat karena telah menghasilkan sejumlah besar intelektual lokal yang cerdas dan memiliki tingkat pemikiran kritis yang sama dengan rekan-rekan mereka di negara-negara Barat. Para intelektual dan kelompok terpelajar dalam bangsa Indonesia inilah yang menjadi

penggerak perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui semangat nasionalisme dan menggunakan cara-cara diplomasi dan militer (Susilo & Isbandiyah, 2018).

Pada abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan melalui aktivitas organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Organisasi-organisasi tersebut ditetapkan sebagai organisasi pergerakan nasional. Dalam konteks munculnya gerakan nasional dan kemanusiaan, pergerakan bisa muncul karena adanya: kekuatan dan pengaruh dari individu (Jalata, 2023); revolusi nasional oleh ideologi (Rose, 1975); opresi dan penjajahan (Khalidi & Samour, 2011); sejarah kelam, propaganda dan stereotype (Sethi, 1996; Gilley, 2017); konflik internal (Siddiqi, 2010); Identitas kesukuan dan perilaku aliansi antar kelompok (Freij, 1997); keberlangsungan identitas budaya terancam (Johnston, 2008); pertentangan strata sosial (Lockman, 1988); dan lain sebagainya.

Lansberger dan Alexandrov (1984: 24-25) memaparkan empat dimensi penting dari sebuah gerakan, yaitu: (1) sejauh mana kesadaran bersama mengenai nasib yang dialami; (2) tingkat aksi kolektif, yang mencakup jumlah individu yang terlibat dan tingkat koordinasi dan pengorganisasian aksi; (3) sejauh mana tindakan tersebut bersifat instrumental dan dirancang untuk mencapai tujuan di luar tindakan itu sendiri; dan (4) sejauh mana reaksi tersebut hanya didasarkan pada rendahnya status sosial, ekonomi, dan politik. Tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Indonesia terlihat pada seluruh aspek kehidupan, diwujudkan dalam semangat pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan perjuangan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang moderat atau radikal, mau bekerja sama (kooperatif) atau tidak mau bekerja sama (non-kooperatif) dengan pemerintah. Munculnya metode kooperatif ini disebabkan karena sifat ambisius tanpa

mempertimbangkan secara matang adanya faktor-faktor lain dalam perjuangan juga menjadi penyebab gagalnya pergerakan nasional itu sendiri (Dana, 2017).

Pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, ideologi politik yang berkembang di belahan dunia lain mulai masuk ke wilayah Indonesia. Antara lain nasionalisme, komunisme, dan Pan-Islamisme yang juga mulai memberikan pengaruh terhadap dinamika dialektis tokoh Minangkabau dan masyarakat awam dalam menentukan posisinya dalam politik pada masa kolonial. Pada awal abad ke-20 M, gerakan Nasionalis masyarakat Minangkabau mengalami pergeseran, berkembang menjadi gerakan sosial keagamaan dan sosial politik. Gerakan Nasionalis ini ditandai dengan munculnya elite-elite baru dalam masyarakat Minangkabau, yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh para ulama Minangkabau. Gerakan nasionalis di Minangkabau yang berlandaskan semangat Islam pada akhirnya berhasil menggagalkan upaya pemerintah kolonial dalam membatasi pergerakan elite agama di wilayah ini (Chaniago, Humairah, & Satria, 2020).

Pergerakan kemerdekaan di Minangkabau diwarnai dengan perbedaan ideologi yang dianut, serta penerapan pendekatan yang berbeda-beda pada masa kolonial, mulai dari kooperatif hingga non-kooperatif dengan penguasa kolonial Hindia Belanda. Dinamika tersebut mengakibatkan munculnya budaya politik yang beragam di kalangan masyarakat Minangkabau pada masa kolonial. Salah satu perpecahan yang paling menonjol dalam masyarakat Minangkabau saat itu adalah persaingan antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Kaum Tua dapat dikategorikan sebagai kelompok "moderat" dan cenderung mempertahankan cara lama (seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli). Sebaliknya, Kaum Muda dicirikan oleh vokal mereka yang menganjurkan reformasi dalam struktur sosial-politik masyarakat Minangkabau dalam beragama dan kehidupan sosial (seperti Syekh Djamil Djambek, Abdul Karim Amarullah (Haji Rasul), Haji Abdullah Ahmad, Syekh Thaib Umar, dan lain sebagainya). Pada dua dekade awal di wilayah Minangkabau, muncul

wacana antara Kaum Tua dan Kaum Muda mengenai persoalan agama dan sosial.

Sadar akan beragamnya perspektif dan metodologi yang digunakan dalam upaya mencapai kemajuan masyarakat, maka Bagindo Djamaloeddin Rasjad bersama rekan-rekan pemuda Minangkabau lainnya membentuk sebuah komite bernama Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.) pada bulan April 1919 di (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980, hal. 65; Kahn, 1980, hal. 10). Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Bagindo Zainuddin, Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.) melanjutkan upaya memfasilitasi dialog dan kolaborasi antar organisasi pergerakan di Minangkabau. S.C.M. menarik pendukung dari kalangan yang bersimpati dengan gerakan Pemuda dan mengadopsi pendekatan kolaboratif terhadap pemerintah. Namun, setelah diangkatnya Sulaiman Efendi, tokoh yang sebelumnya terkait dengan *Insoelinde*, arah organisasi berubah menjadi 'radikal' bagi pemerintah Belanda (Zed, 2009, hal. 42).

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengkaji sejarah pergerakan kemerdekaan di Minangkabau, seperti: 1) pergerakan lewat organisasi: Jong Sumatranen Bond (J.S.B.) yang berlandaskan etnisitas pemuda Sumatra dan nasionalisme (Nurfathiha, 2022); Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) yang berorientasi Islam Modern dan nasionalis (Kahin, 1984, 2008; Abdullah, 2009: 177); Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) yang berideologi komunis (Marzali, 2020); Sarekat Adat Alam Minangkabau (S.A.A.M.) dan Madjelis Tinggi Kerapatan Adat Minangkabau (M.T.K.A.A.M.) yang berbasis organisasi pemuka adat yang kooperatif dengan pemerintah kolonial (Ersi, 2015), dan lain sebagainya; 2) pergerakan lewat media pers seperti koran dan majalah: seperti Al-Moenir, Soenting Melajoe, Oetoesan Melajoe, Tjaja Soematra, Boedi Tjaniago dan lain sebagainya (Sunarti, 2015); 3) serta pergerakan lewat dunia pendidikan seperti Diniyah School (1916), Sumatera Thawalib (1918), dan Diniyah Puteri (1923) (Noer, 1982).

Sejauh penelusuran penelitian, belum ditemukan penelitian yang mengkaji sejarah

pergerakan organisasi Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.). Corak pergerakan organisasi ini menarik untuk dikaji karena berbeda dengan corak organisasi pergerakan di Minangkabau yang telah dibahas sebelumnya. Dikarenakan cara kegiatan sarekat ini tidak terafiliasi dengan ideologi politik tertentu, dan perkumpulan ini bertujuan untuk memperkuat ikatan kerjasama timbal balik antara organisasi-organisasi pergerakan yang telah ada, serta menjembatani aspirasi masyarakat Minangkabau pada umumnya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan eksistensi Sarekat Combinatie Minangkabau (S.C.M.) dalam memperjuangkan kehidupan masyarakat Minangkabau selama masa kolonialisme Belanda.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 1986: 35).

Heuristik adalah proses pengumpulan sumber. Sumber utama yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah surat kabar dan majalah pada periode kolonialisme Belanda dan pasca kemerdekaan. Sumber-sumber primer ini diakses melalui *digital library* Delpher. Selain sumber primer, penulis juga menelusuri pustaka lainnya berupa buku dan jurnal.

Langkah selanjutnya yakni kritik sumber. Tahap ini bertujuan untuk menilai keotentikan, dan keabsahan sumber data. Penilaian dilihat dari aspek eksternnya (seperti bahan pembuatan dan kondisi lingkungan sumber data didapatkan), serta unsur intern (kandungan informasi dan sudut pandang yang mempengaruhi informasi). Pemakaian sumber berupa koran-koran dan majalah periode kolonial sangat layak digunakan karena kedekatan pembuatan sumber ini dengan eksistensi S.C.M. baik dari terbitan S.C.M. itu sendiri maupun dari koran/majalah terbitan organisasi lain yang menyoroti kiprah S.C.M. masa tersebut.

Tahap interpretasi atau analisis terjadi baik pada awal penelitian maupun pada saat

proses analisis pasca penelitian. Analisis topik ini dimulai dengan mengkaji faktor-faktor yang mendorong peristiwa sejarah. Menurut Carl G. Gustavson dalam '*A Preface of History*' yang dikembangkan Kuntowijoyo, ada enam kekuatan yang mendorong peristiwa sejarah: ekonomi, agama, institusi/politik, teknologi, ideologi, dan militer. Selain enam aspek tersebut, Kuntowijoyo mengidentifikasi kekuatan sejarah lain yang mendorong peristiwa, antara lain ekonomi, agama, politik/lembaga, teknologi, ideologi, militer, individu, gender/jenis kelamin, usia, kelas, etnis, ras, mitos, dan budaya (Kuntowijoyo, 1995).

Tahap akhir penelitian ini adalah historiografi yang disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah sejarah.

PEMBAHASAN

Proses Pendirian Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.)

Sarekat Combinatie Minangkabau (S. C. M.), organisasi ini didirikan pada April 1919 oleh seorang lulusan sekolah pertanian Wageningen di Belanda, Bagindo Djamaluddin Rasjad. Organisasi ini didirikan dengan tujuan sebagai jembatan penghubung suara dan aspirasi kelompok-kelompok pergerakan yang ada di Minangkabau.

Sebelum dibentuk pada April 1919, organisasi ini awalnya bersifat pasif dan belum resmi. Namun menyadari hasil progresif dari perkumpulan ini, diadakanlah sebuah rapat umum di Fort de Kock tanggal 27 Januari 1919. Panitia rapat tersebut terdiri dari Bagindo Djamaloedin Rasjad sebagai ketua, serta Soetan Perpatih sebagai sekretaris. Proposal pembentukan secara resmi organisasi ini kemudian dikirimkan kepada Komisi untuk Revisi Organisasi Negara di Belanda. Proposal ini ditindaklanjuti pada rapat umum selanjutnya di Padang Panjang pada 8-9 Maret 1919 dengan menambahkan dua sekretaris. Hasil rapat tersebut kemudian diserahkan kepada Komisi Revisi dan salinannya kepada Gubernur Jenderal dan dewan redaksi milik S.C.M., "*Soematera Bergerak*", yang diminta untuk mengumumkan hasil rapat ini kepada publik.

Hasilnya pada 18 April, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, diadakan sebuah rapat umum di Fort de Kock untuk melanggengkan organisasi ini. Rapat pembentukan pengurus dilakukan. Sebelumnya, ketua memberikan pidato di mana dia menjelaskan bahwa anggota dewan haruslah orang-orang yang memiliki hati manusia, sementara mereka harus mendapatkan beberapa pengembangan dan pengetahuan yang dapat berguna bagi asosiasi. Usia, jabatan atau profesi tidak diperhitungkan.

Hasil rapat menghasilkan bahwa tempat kedudukan dewan pengurus adalah di Fort de Kock. Para anggota dewan dipilih: B. Djamaloedin (ketua), Roesad Soetan Perpatih (wakil ketua), S. Said Ali dan H. Soetan Perpatih (sekretaris), A. R. Soetan Maharaja (bendahara), sedangkan 6 orang komisariss diangkat, masing-masing untuk bidang agama, adat, hukum, pemerintahan, perdagangan, dan pertanian. Biaya masuk untuk setiap perkumpulan adalah f. 10.

Tujuan perkumpulan ini adalah: memperkuat ikatan timbal balik antara berbagai perkumpulan pribumi; berperan dalam terciptanya ketentraman negara dan memperjuangkan hak-hak sosial dan adat rakyat Minangkabau. Untuk mencapai tujuan ini, S.C.M. memberi nasihat, kritikan dan masukan yang bulat dalam rapat-rapat umum. Serta membentuk sebuah majalah yang akan diterbitkan yang akan membahas seputar masukan dan kritikan baik terhadap pemerintah, dewan rakyat, pembahasan seputar pendidikan, agama, dan lain-lain (Serikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.), 1919, hal. 2).

Selain membentuk majalah, sebuah kas keuangan akan disiapkan untuk kepentingan biaya operasional organisasi dan keperluan rakyat Minangkabau. S.C.M. berhak memutuskan hubungan atau membentuk hubungan baru dengan perkumpulan-perkumpulan di Hindia atau di Belanda. Selama rapat pengesahan berdirinya organisasi ini, ketua umum dalam pidatonya mengkritik kondisi kemakmuran Minangkabau yang saat itu sebenarnya hanya pada permukaan saja dan berada dalam "neraka duniawi". Kritikan juga dilontarkan pada pemerintah pusat yang tidak

tahu menahu dengan kondisi masyarakat lain sehingga menyebabkan pemberontakan dan masalah daerah. Ia juga mengkritik mengenai sebagian besar pejabat pemerintah, seperti Gubernur Jenderal dan Ratu, sebagian besar tidak jujur, "*Cantik di luar, jelek di dalam, jauh dari kebenaran*".

"Suara-suara itu tidak menyatakan kegembiraan, tetapi menyatakan kemarahan yang diam-diam di dalam hati, karena tidak dapat menginjak-injak musuh yang tersembunyi, ... yang membentuk pagger, yang merusak tanam-tanaman, yang menyerang anak-anak perempuan pada istri rakyat ... atau yang dengan diam-diam mengangkut bangkai-bangkai dan sapi-sapi, sehingga tidak ada keterangan yang dapat ditemukan." (potongan pidato Bagindo Djamiluddin Rasjad).

S.C.M. juga mengkritik perkumpulan-perkumpulan lain yang eksis di Minangkabau saat itu. Djamiluddin Rasjad melihat organisasi-organisasi seperti jamur; menyokong rakyat dan seterusnya. Tetapi kenyataannya membawa perpecahan dan perpecahan, sedangkan anggota-anggotanya adalah orang-orang yang bodoh dan mudah ditipu. Tidak ada bantuan atau perlindungan sama sekali yang dapat diharapkan dari sebagian besar penduduk asli, pejabat Belanda, serta dari perkumpulan-perkumpulan akar rumput di Minangkabau yang sering kali "*yang mencangkul menghancurkan yang ditanami, yang menyokong menyebabkan yang disokong tumbang*".

Oleh karena itu, S.C.M. mendeklarasikan diri mereka akan eksis dan menggunakan segala sumber daya untuk keselamatan tanah dan rakyat Minangkabau. Pidato ketua ini mendapat respon positif dari yang menghadiri acara tersebut (Serikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.), 1919, hal. 3). Pengesahan berdirinya organisasi ini kemudian diberitakan lewat koran *Neratja* terbitan 12 Mei 1919 no. 92 (Koloniaal tijdschrift, 1919, hal. 65; Serikat Combinatie Minangkabau, 1919).

Pergerakan awal Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.): Persaingan, Kritik dan Sindiran

Menanggapi pidato yang dilontarkan oleh Ketua S.C.M. tersebut, terdapat sebuah kritikan keras yang datang dari editor majalah *Oetoesan-Melajoe*. Editor tersebut menyoroti tidak hadirnya perwakilan S.A.A.M. (Sarekat Adat Alam Minangkabau) pada rapat pengukuhan itu. Editor tersebut berpendapat bahwa jika tidak ada orang yang mengkritik, hal ini masih belum merupakan bukti, bahwa semua orang Minangkabau sepenuhnya setuju/menyetujui orasi-orasi S.C.M. Tidaklah tepat bagi S.C.M. untuk membandingkan negeri ini dengan Jawa. Editor tersebut menekankan bahwa Minangkabau terselamatkan dari kehancuran karena hukum adatnya. Minangkabau mempunyai hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang Sri Diradja, Perpatih nan Sebatang dan Ketoemangoengan. Minangkabau memiliki dua konstitusi dan empat hukumnya, terutama persatuan suku dan payung, yang merupakan jaminan bagi kemakmuran negara, yang penduduknya. Dibandingkan dengan penduduk Jawa, hidup orang Minangkabau dalam kondisi yang jauh lebih baik, terutama kaum wanita Minangkabau. Oleh karena itu, tidak pantas jika dikatakan bahwa di Minangkabau ada "neraka duniawi". Sangat mudah untuk mengatakan hal ini karena "*lidah tidak bertulang*".

Editor *Oetoesan-Melajoe* juga mengkritik mengenai kurangnya survey yang dilakukan S.C.M. sebelum membicarakan kemakmuran yang sudah tercapai di beberapa daerah Minangkabau. Penurunan sang editor menjelaskan berdasarkan pengalamannya, bahwa selama menjadi jaksi di Pariaman pada tahun 1891, bahwa orang-orang kampung sekarang hidup dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada 30 tahun yang lalu. Harga kopra sekarang f.12,50, padahal dulu hanya f.5,- atau f.6,-. Rumah-rumah masyarakat sekarang terlihat lebih baik. Sehingga S.C.M. tidak boleh berbicara tentang neraka duniawi, terutama sehubungan dengan bahwa Tuan Le Pebre adalah kepala daerah Minangkabau saat itu. Secara keras editor *Oetoesan-Melajoe*

menyampaikan kepada S.C.M. "*Tunjukkan dulu apa yang bisa Anda lakukan dan jangan mulai menjelek-jelekkan perkumpulan orang lain. Perhatikanlah nasib perkumpulan yang didirikan di Fort de Kock pada zaman dulu, yang bernama "Boedi Baik" (dan sekarang sudah tidak ada lagi)*". Peremehan terhadap perkumpulan-perkumpulan lain ini merupakan bukti kesombongan dan keangkuhan diri dari Sarikat Combinatie Minangkabau (Serikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.), 1919, hal. 3-4).

Pada masa awal pembentukannya, kondisi perkumpulan Indonesia saat itu masih diliputi kewas-wasan yang ditimbulkan penangkapan anggota-anggota perkumpulan pribumi oleh pemerintah kolonial. Seperti adanya penangkapan dua orang Bolshevik Tionghoa di Semarang. S.C.M. yang mulai eksis kerap dilontarkan pertanyaan dari majalah-majalah pribumi mengenai apakah mungkin ada juga kaum Bolshevik di antara Kaum Muda di Pantai Barat Sumatera. Terlebih setelah naiknya Tuan Whitlau yang telah ditunjuk sebagai kepala wilayah, seseorang yang tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun. Bahkan konon pilihan itu jatuh pada pejabat itu justru karena alasan tersebut, dengan maksud agar perkumpulan pemuda Minangkabau, termasuk berdirinya perkumpulan Sarikat Combinatie Minangkabau dan majalahnya "*Sumatera-Bergerak*" agar lebih tertib. Kondisi seperti ini menyebabkan Soetan Said Ali selaku editor majalah "*Sumatera-Bergerak*" mengenang bagaimana dulu ia mengedit kolom *Extra-Ma'loemat* yang memberitakan kebencian terhadap Belanda di majalahnya (BOLSHEVIKS (KAUM MOEDA) ter Sum. Westkust, 1919).

Walau demikian kemunculan S.C.M. yang awalnya diharapkan menjadi "jembatan" antar kelompok, ternyata juga menimbulkan respon yang berbeda. Sebagaimana yang telah disampaikan *Oetoesan-Melajoe* pada kritikan mereka terhadap sarekat ini pada pendiriannya, ketidak hadirannya S.A.A.M. (Sarekat Adat Alam Minangkabau) akan menimbulkan dinamika baru kedepannya. Pada tahun 1919, sudah didirikan juga di Fort de Kock lembaga S.A.A.M. tepatnya di Tilatang Kamang dan Ampat Angkat.

Sepanjang Agustus 1919, S.A.A.M. saat itu bersama 2.000 orang masyarakat pergi menuju Fort de Kock untuk menanyakan dan menyelesaikan persoalan harga beras dan penyelesaian masalah kelaparan yang tengah terjadi saat itu. Namun kondisi yang diharapkan tidak kunjung datang dikarenakan tak ada respon yang diberikan dari pemerintah kolonial, dan terdapat sebuah larangan dan pencegahan akan terbentuknya cabang-cabang S.A.A.M. lainnya di kawasan Agam. Kondisi tekanan ini pada S.A.A.M. pada masa pemerintahan Tuan Whitlau di Pantai Barat Sumatera, menyebabkan S.C.M. yang bersifat kooperatif oleh pimpinan Bagindo Djamil Rasjad, akan segera mendominasi di masyarakat Minangkabau (DE S.A.A.M. in het Fort de Kock, 1919).

Karena dominasi dan eksistensi mereka yang dimotori oleh Kaum Muda, Kaum Tua mulai mengeluarkan propaganda mereka dalam mengkritik Kaum Muda dalam memotori S.C.M. Kaum Tua kerap mengatakan Kaum Muda sebagai bagian dari kaum Wahabi yang menyebabkan gerakan revolusi Paderi dahulu. Kaum Tua membanggakan diri mereka karena tetap saat itu sebagian besar kalangan mereka adalah pemimpin orang-orang Minangkabau, bukan Kaum Muda. Dana Belajar Minangkabau di Fort de Kock bukan milik Kaoem Moeda, karena presidennya adalah Djaksa Soetan Saripado dan diantara komisarisnya ada Datoek Mangkoeto Sati, demang IV Angkat. Kaum Tua juga berspekulasi bahwa Sjech Mohammad Djamil Djambek di Fort de Kock (Kaoem Moeda) digunakan oleh Bagindo Djamil Rasjad sebagai alat pembentukan Sarikat Combinatie Minangkabau. S.C.M. dan Kaum Muda dilihat oleh Kaum Tua sebagai perkumpulan yang melihat *panghulu* hingga penduduk, adalah budak rakyat (De Kaoem Moeda, 1919).

Pergerakan Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.): Persoalan Tanah di Minangkabau

Salah satu isu masyarakat Minangkabau yang coba dipecahkan oleh S.C.M. masa kepemimpinan Soelaiman Effendi adalah perihal tanah di Minangkabau. S.C.M.

mengkritik Direktur Jenderal sejak awal tahun 1919 yang beranggapan bahwa kurang penting bagi penduduk Lintau mengenai permasalahan sewa tanah di wilayah mereka. Sejatinya sejak awal tahun 1919, penduduk Lintau telah banyak memanggil penghulu-penghulu mereka untuk meminta bantuan administrasi kepada Sarikat Minangkabau – Pariaman untuk menyelesaikan keberatan. Residen Le Fébvre saat itu menyarankan para penghulu Lintau untuk menyampaikan protes kepada Pemerintah. Pengaduan yang disampaikan kepada Pemerintah, sebagaimana dimaksud Direktur, berasal dari masyarakat sendiri, yang mengetahui bahwa hak-haknya dirampas dan diingkari. Mengenai persoalan bidang tanah yang disewakan jangka panjang kepada Baumer di Kecamatan Lintau, sama sekali bukan tanah bekas, bukan tanah yang digarap, tetapi sebenarnya berisi kebun-kebun yang dibuat oleh penduduk. Oleh karena itu, penasehat Direktur tersebut rupanya telah membuang pasir ke telinga Pemerintah, akibatnya hak milik masyarakat Lintau *“terhapus dan tidak ada keadilan terhadap Tuhan.”*

Setelah mencontohkan lebih lanjut protes yang disampaikan pengurus Sarikat Combinatie Minangkabau kepada Residen Pantai Barat Sumatera, maka dicantumkan juga tanggapan yang diterima Residen tersebut. Tanggal 4 Juni 1919, dimana Administrator Daerah menyayangkan bahwa *Repteerinr*, tanpa memperoleh nasihatnya, memberikan kesempatan kepada Tuan Baumer untuk mendaftarkan bidang tanah tersebut ke dalam daftar umum, sedangkan sebagai tanggapan atas jawaban itu dinyatakan bahwa ia mengajukan petisi dari papan kombinasi diteruskan ke Gubernur Jenderal. S.C.M. juga menyatakan bahwa sangat penting bagi *Volksraad* untuk memastikan bahwa Pemerintah segera mengirimkan sebuah komite yang ditunjuk oleh para anggota *Raad* tersebut, ke wilayah tersebut untuk menyelidiki berbagai keluhan penduduk di sana. Penyelidikan itu tidak dilakukan secara rahasia tetapi di depan umum (Erfpachtsperceel K. Baumer In De Volksraad, 1920, hal. 1-2).

Persoalan ini terus berlanjut hingga tahun berikutnya. Disampaikan S. Said Ali, Wakil Ketua Sarikat Combinatie Minangkabau, kepada Gubernur Jenderal pada kunjungannya ke Padang Agustus 1920. Bahwa sementara dewan Minangkabau diminta, pihak ketiga mencatat bahwa penduduk Lintau dan Halaban tidak melihat hak-hak mereka cukup terlindungi dengan memberikan tanah yang disewakan kepada Baumer dan jelas bahwa Pemerintah dan *Volksraad* secara sepihak mengambil alih tanah masyarakat Minangkabau dan mengambil keuntungan untuk mendukung orang asing dan melawan kemakmuran ribuan rakyat. Pihak S.C.M. menyuarakan agar kebijakan yang dikeluarkan sebaiknya adalah sebelum tanah disewakan, masyarakat atau asosiasi masyarakat didengarkan dan tidak hanya disosialisasikan kebijakan itu dengan poster karena hal ini tidak dipahami secara umum. Kemudian diminta ketika ada orang yang datang kepada masyarakat untuk menyampaikan sesuatu, khususnya jika hal tersebut demi kepentingan umum, para pejabat akan berbicara kepada mereka haruslah menyampaikan dengan baik dan jujur. Kemudian S.C.M. juga meminta pemerintah mengubah tatanan Bank Rakyat Minangkabau yang sejak awal berdirinya tidak bekerja untuk memenuhi kepuasan rakyat.

Lontaran protes juga dilakukan terhadap fakta bahwa sebidang tanah yang secara resmi dialokasikan kepada masyarakat pedalaman kita, yang dimaksudkan untuk sekolah perempuan, sebagian diambil untuk kepentingan pegadaian. Hal terakhir ini merupakan bukti bagi pihak yang dituju bahwa pihak berwenang yang seharusnya melaksanakan perjanjian (referensi tanah) gagal melakukan tugasnya. Dalam terbitan selanjutnya diumumkan bahwa hanya Soeleiman Effendi yang didengar oleh Gubernur Jenderal selama berbicara tentang Dewan Minangkabau. Segala lontaran permintaan dan kritikan yang diberikan S.C.M. akan dipertimbangkan dan dibahas di *Volksraad* (Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers, 1920).

Persoalan tanah rakyat Minangkabau tetap menjadi salah satu isu yang diperjuangkan oleh Sarikat Combinatie Minangkabau. Pada

masa itu, tanah menjadi sebuah barang yang kerap diperjual belikan secara semena-mena dan tindakan ketidakadilan yang nyata. Banyak terdapat iklan-iklan di majalah-majalah Eropa yang menyatakan terdapat penjualan umum pada Oktober 1920 atas tanah-tanah di Sumatera dan hak-hak sewa properti. Walau demikian, kebijakan-kebijakan yang dilontar pemerintah kolonial saat itu kerap merugikan masyarakat Sumatera atas kepemilikan tanah mereka, ditambah tanah Minangkabau sendiri memiliki peraturan adat yang unik yaitu adanya kepemilikan tanah ulayat suku atau *pusako tinggi*. S.C.M. dan organisasi pergerakan lainnya kerap mengkritik dan menuntut pemerintah pada ruang-ruang publik mengenai hal ini dan menyatakan menyesalkan kebijakan pertanahan yang diusung sebelumnya, sehingga banyak tanah milik penduduk yang jatuh ke tangan para pemburu pemegang konsesi. Jika penggunaan lahan-lahan ini jelas atas nama sewa untuk ditanami, maka tidak akan ada keberatan. Asalkan hak-hak penduduk tidak dirugikan, misalnya dengan merampas tanah dan menghilangkan penggunaan air di sawah. Jika persoalan ini terjadi hingga kemudian digunakan untuk menjual tanah kepada publik seperti yang telah dijelaskan di atas, maka masyarakat Sumatera harus memprotesnya. Oleh karena itu seperti dijelaskan sebelumnya, Sarikat Combinatie Minangkabau menjadi perkumpulan yang sangat vokal dalam memperjuangkan hak-hak penduduk atas "tanah ulayat" masih dilindungi adat. Menurut S.C.M., justru adat itulah bila ditegakkan dengan benar, seseorang dapat menolak penerapan lembaran negara atas tanah yang berlaku sejak tahun 1874, yang tiba-tiba menyatakan "tanah kosong" di Minangkabau menjadi milik negara (De Bevolking Ek Haar Bosschen, 1920, hal. 3-4). Karena sejatinya tanah kosong itu tidak ada, kosong bukan karena tak ada individu yang memilikinya, melainkan tanah itu adalah milik suku dan kaum Minangkabau.

Pergerakan Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.): Persoalan Otonomi dan Hak Suara di Minangkabau

Selain memperjuangkan eksistensi tanah ulayat masyarakat Minangkabau, agenda lain yang diperjuangkan oleh S.C.M. adalah adanya otonomi bagi Minangkabau. Sejak Januari 1922, sudah diselenggarakan pertemuan oleh pengurus Sarikat Combinatie Minangkabau di Padang Panjang mengenai tentang gerakan otonomi. Dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencapai pemerintahan sendiri dalam arti pemerintahan otonom yang dimiliki, namun tetap menjadi bagian dari negara. Sehingga sama sekali bukan maksud untuk memutuskan ikatan antara Belanda dan Hindia (*Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*, 1922, hal. 201).

Langkah selanjutnya yang dilakukan ialah menerbitkan beberapa artikel dalam berbagai isu yang mendorong terbentuknya persatuan Sumatera; termasuk manifesto Sarikat Combinatie Minangkabau yang menyatakan dukungan terhadap upaya Komite Otonomi, sedangkan seruan komite ini sendiri juga dicetak dalam laporan yang disampaikan pada edisi 9 Februari sejak tanggal 29 Januari yang diselenggarakan pertemuan otonomi di Fort de Kock yang berasal dari Sarikat Combinatie Minangkabau (*Eenheid Van Sumatra. Autonomie Van Indië*, 1922, hal. 190).

Terjadi beberapa perdebatan mengenai usulan otonomi oleh Sarikat Combinatie Minangkabau ini. Bagindo Djamil, ketua Sarikat Combinatie Minangkabau, memberikan beberapa penjelasan lebih lanjut dan mengingatkan kembali Komite Otonomi, sebagaimana dinyatakannya dengan tegas, tidak menginginkan “terpisah dari Belanda”, hanya persamaan kulit putih dan coklat serta penghapusan segala perbedaan. Segera setelah ada pesan bahwa Panitia Hukum Pemilu telah meminta pendapat Uni Sumatera, Ketua Gabungan Minangkabau sudah mulai mengerjakan pertemuan di Padang Panjang pada 23 April 1922. Setelah beberapa kali berkonsultasi, diputuskan untuk mengirimkan surat edaran kepada sub-komite Otonomi sebelumnya, untuk menginformasikan hal ini kepada mereka dan menentukan tanggal pertemuan yang akan diadakan (*Kiesrecht*, 1922, hal. 224).

Selain membahas komite otonomi, pertemuan S.C.M. juga membahas tentang hak suara dan proses pemilihan umum bagi di masyarakat Minangkabau serta Sumatera pada umumnya. Di meja pengurus terdapat ketua Djamil dan sekretaris asosiasi S. Said Ali, sekretaris kedua, serta Bapak Datoek Toemanggoeng nan Gedang, ketua pengurus utama Persatuan Sumatera, dan St. M. Zain, anggota dari *Volksraad*; Selanjutnya beberapa asosiasi turut diwakili antara lain Boedi Tjaniago, Bond Afd. Painan, P. G. H. B. Dept. Solok, dan Guru Agama Islam. Ass.-Residen dan pihak-pihak lain juga turut hadir.

Ketua Djamil membuka rapat dan mengumumkan bahwa ia telah menerima surat dari pengurus utama Persatuan Sumatera di Batavia sehubungan dengan pembentukan panitia hukum pemilu, yang meminta untuk membicarakan masalah tersebut di Sarikat Combinatie Minangkabau. Surat dari Panitia Hukum Pemilu ini kemudian dibacakan oleh sekretarisnya: meskipun pembacaannya memakan waktu lama, namun tetap mendapat perhatian dari mereka yang hadir. Sejumlah pembicara terdengar semuanya menyatakan dukungannya terhadap isi surat yang dimaksud, bahkan perwakilan Boedi Tjaniago berharap hak pilih diberikan kepada semua yang selamat dari masa kanak-kanak, baik laki-laki maupun perempuan. Pertemuan tersebut menyatakan persetujuannya terhadap hal tersebut.

Tuan Ibrahim, ketua Departemen Obligasi Painan, melalui perbandingan yang simbolis, membangkitkan dukungan terhadap kerja Persatuan Sumatera, dan Zain menyatakan kepuasannya bahwa para hadirin setuju dengan pandangannya mengenai hak untuk memilih, sehingga ketika ia membahas masalah ini di *Volksraad*, tidak dapat dikatakan bahwa dia berbicara untuk dirinya sendiri. Datoek Toemanggoeng juga mengatakan bahwa dia senang dengan kesepakatan umum dengan niat Persatuan Sumatera dan berjanji akan (membantu) memenuhi keinginan tersebut. Pidato tersebut, digambarkan dimulai dengan nada yang moderat namun lambat laun menjadi lebih kuat, memberikan kesan yang luar biasa, menurut reporter: membuat orang yang pengecut menjadi berani, dan orang buta

menjadi jelas di mata (Kiesrecht, 1922, hal. 224-225; De Sumatraansche Eenheid, 1922, hal. 226; Kiesrecht-Meeting Padang Pandjang, 1922, hal. 253).

Dinamika Hubungan Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.) dan Sumatera Thawalib

Salah satu organisasi yang memiliki hubungan yang dinamis dengan S.C.M. adalah Sumatera Thawalib. Sejak tahun 1919, kedua organisasi ini sudah saling bekerjasama dalam bertukar informasi di bidang pendidikan dan politik. Hal ini dikarenakan kesamaan mereka yang sama peduli dengan kondisi pendidikan masyarakat Minangkabau saat itu. Namun yang menjadi pembeda kedua organisasi ini adalah Sumatera Thawalib secara murni bergerak di bidang pendidikan, sedangkan S.C.M. memperjuangkan pendidikan melalui saluran politik (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980, hal. 64).

Bentuk hubungan kedua organisasi ini bisa dilihat pada sebuah rapat 16 April 1922 oleh perkumpulan Sumatera Thawalib yang diselenggarakan di Padang Panjang. Pertemuan Sumatera Thawalib ini juga dihadiri oleh pengurus utama dan wakil-wakil dari departemen di Padang Panjang, Parabek, Maninjau, Padang Japang dan Batu Sangkar (Fort van der Capellen). Terjadi perdebatan mengenai penggabungan departemen-departemen yang diusulkan oleh Sarikat Combinatie Minangkabau menjadi suatu perkumpulan tanpa pengurus pusat dan tanpa pengurus departemen tersendiri dan mengenai apakah, menurut usulan Gabungan Sarikat, selain pendidikan agama, pendidikan ekonomi dan politik juga akan dilaksanakan dan disediakan mulai sekarang. Akhirnya diambil beberapa keputusan, sekaligus disepakati juga untuk menyatukan pendidikan di berbagai sekolah yang tergabung dalam asosiasi, sehingga seorang siswa akan berada di kelas yang sama ketika berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain (Studievereeniging, 1922, hal. 264).

Hubungan erat S.C.M. dan Sumatera Thawalib juga tampak bagaimana Thawalib juga bersedia menyediakan ruangan organisasi mereka sebagai ruangan beberapa rapat

S.C.M. yang dilaksanakan tertutup di Padang Panjang. Seperti pertemuan tertutup Sarikat Combinatie Minangkabau yang diadakan di Padang Pandjang pada tanggal 14 Mei 1922, dimana tidak dapat banyak informasi yang didapatkan mengenai apa agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut (Sarikat Combinatie Minangkabau, 1922, hal. 299). Informasi baru didapatkan setelah adanya laporan yang dikeluarkan. Dimana redaksi Marah Srimahadewa dan pegawai majalah Hasan Noel 'Arifin mengumumkan bahwa sebagai ketua dan sekretaris asosiasi pegawai "Keroekoenan Pemakan Gadji" mereka telah dilimpahkan ke rapat tertutup Sarikat Combinatie Minangkabau yang diadakan 14 Mei 1922 di Padang Pandjang. Rapat yang dilaksanakan di kantor perkumpulan Thawalib Sumatera di Padang Panjang, dihadiri oleh 13 delegasi dari perkumpulan di Pantai Barat Sumatera serta perwakilan majalah *Warta-Hindia*, *Sinar-Sumatera*, *Neratja*, *Sumatera-Bergerak* dan *Boedi-Tjaniago*.

S.C.M. sangat menyadari pentingnya bekerjasama dengan majalah-majalah dan badan pers bumiputra dalam pergerakan mereka. Munculnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20 dibarengi dengan kemunculan dan perkembangan media pers pribumi. Saat itu, pers Bumiputera memegang peranan penting dan strategis dalam menumbuhkan rasa jati diri bangsa Indonesia. Peran penting perjuangan kemerdekaan terlihat dari fungsi media sebagai penyalur gagasan dan wacana gerakan. Selain itu, media asli mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai agen sosial yang sangat berpengaruh dan efektif (Chaniago & Humairah, 2019).

Hal-hal yang dimasukkan dalam agenda dan keputusan-keputusan yang diambil adalah (Sarikat Combinatie Minangkabau, 1922, hal. 301): 1) Ketigabelas afiliasi yang diwakili dalam pertemuan tersebut berkeinginan dan sepakat untuk bergabung bersama dalam Sarikat Combinatie Minangkabau; 2) Bertujuan untuk menerbitkan surat kabar harian "*Minangkabau Bergerak*", namun karena berbagai hal belum terselesaikan, maka terbitan berkala *Sumatra Bergerak* untuk

sementara digunakan untuk diperluas menjadi surat kabar harian. Masalah yang dihadapi majalah ini karena kesibukan para editor, seperti saat S. Said Ali yang diutus bersama Tuan Bagindo Djamiluddin Rasjad oleh Gabungan Sjarikat Minangkabau ke Kongres Seluruh Hindia pada tahun Bandung. Serta urusan dinas luar lainnya yang menyebabkan keterlambatan Said Ali sebagai redaktur dalam pengurusan majalah ini (Redactie En Administratie, 1922: 177). Para delegasi menyampaikan janji masing-masing untuk merekrut pembaca di asosiasi dan lingkarannya masing-masing; 3) Sarikat Combinatie Minangkabau akan menyampaikan usulan tersebut kepada Pengurus Panitia Persatoean Sumatera di Sibolga, pada tempat duduk hari itu juga. memindahkan administrasi ke Padang; Keputusan lain juga telah diambil, namun tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan oleh pelapor.

Walau terdapat beberapa jalinan kerjasama, seperti sifat 'manusiawi' pada umumnya, rasa persaingan juga menyelimuti secara tersirat pada kedua organisasi ini. Secara jumlah, keanggotaan Sumatera Thawalib jauh lebih banyak dibandingkan keanggotaan S.C.M. Keanggotaan Thawalib tersebar di kawasan Sumatera Barat hingga pelosoknya, sedangkan keanggotaan S.C.M. banyak terdapat di kota-kota. Tak heran bila diantara keduanya juga terlibat persaingan untuk menebar pengaruh mereka di masyarakat Minangkabau. Bentuk persaingan yang mulai menggerogoti Thawalib mulai terlihat ketika masuknya Dt. Batuah yang membawa pengaruh komunisme dari Jawa ke badan Thawalib. Sehingga pada tahun 1923 nanti, Thawalib juga terjun pada ranah politik.

Menyadari adanya hawa persaingan, Bagindo Djamiluddin Rasjad berusaha melemahkan pengaruh Thawalib dengan cara mempengaruhi kekuatan-kekuatan cabang yang dimiliki Sumatera Thawalib. Otonomi yang merupakan salah satu ide perjuangan S.C.M. dalam memperjuangkan hak masyarakat Minangkabau, juga diterapkan S.C.M. untuk mempengaruhi cabang-cabang Sumatera Thawalib untuk meminta otonomi dan kebebasan para cabang untuk bebas

bergerak sendiri. Tak hanya cabang yang dipengaruhi, pendekatan persuasif juga dilakukan S.C.M. kepada dewan pusat Sumatera Thawalib agar berkiprah di masyarakat tidak hanya di bidang pendidikan saja, tapi juga pada kebutuhan pokok masyarakat lainnya seiring zaman yakni ekonomi dan politik. Strategi ini berhasil dimana pada akhirnya cabang-cabang Thawalib berhasil terpengaruh untuk independen, sementara pusat mulai mengalami kesibukan di luar bidang pendidikan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980: 64).

Manuver Baru hingga Penghujung Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.)

Sepanjang masa jabatannya, S.C.M. telah berupaya berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat Minangkabau. Namun, setelah terpilihnya ketua baru, Soelaiman Effendi, faksi-faksi radikal terbentuk di dalam CSM, yang menunjukkan orientasi politik yang sejalan dengan *National Indies Partij* (NIP). Bersama sayap pemuda Sarekat Islam dan *National Indies Partij* (NIP) cabang lokal, Gerakan Pusat Sarekat Islam (S.C.M.) menyelenggarakan pertemuan bertajuk Kongres Persatuan Sumatera yang diadakan pada bulan Juli 1922 di Padang. Jelang kongres, sejumlah tokoh lintas etnis antara lain Manullang, A Karim M.S. (yang kemudian menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia di Sumatera), dan jurnalis Hindia Sepakat dari Angkola, Abdul Manap dan Parada Harahap, mengadakan dua pertemuan pendahuluan di Sibolga dan Padang pada bulan November dan Desember 1921.

Selain organisasi pendukung, panitia kongres juga mengundang sejumlah organisasi yang berbasis di Tapanuli, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Timur. Pada pelaksanaan Kongres Persatuan Sumatera (*Sumatranenbond*), isu utama Sumatera sebagai pulau masa depan dibahas, dan seruan persatuan antar suku yang berada di pulau tersebut. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mencapai pembebasan dan pembangunan di Sumatera. Pendekatan ini diharapkan dapat diperluas ke wilayah lain di Hindia Belanda.

Selanjutnya pertemuan tersebut menghasilkan pembentukan dewan pusat untuk seluruh wilayah di Sumatera dan pembentukan kantor pusat di salah satu kota besar yang lokasinya akan ditentukan kemudian. Selain itu, kongres tersebut menghasilkan resolusi yang menyerukan segera diberikannya otonomi kepada Sumatera. Hal ini didorong oleh keinginan daerah tersebut untuk mengakhiri kekuasaan Belanda di Hindia Belanda.

Meskipun pertemuan tersebut berhasil, sifat radikal dari resolusi yang muncul dengan cepat diidentifikasi oleh pemerintah kolonial sebagai suatu hal yang memprihatinkan. Seperti Manullang, sejumlah individu yang terlibat dalam Kongres kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Mengambil laporan *Tjaja Sumatra* tanggal 14 Desember, rapat tanggal 7 Desember mengenai pengunduran diri pengurus utama Sumatranenbond, redaksi *Oetoesan Melajoe* memberikan beberapa catatan penjelasan, di mana mereka menjelaskan antara lain bahwa Ketua Batak-Bond, Manullang, datang ke Padang untuk menunggu putusan Majelis Kehakiman atas perkaranya dan bukan secara khusus menghadiri rapat yang bersangkutan; bahwa yang disebut Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.) hanya boleh terdiri dari satu atau dua orang, karena ada ribuan warga Minangkabau yang tidak memilih bertindak sesuai kemauan Baginda Djamiloeidin, rekan Abdul Moeis. Bahwa ribuan warga Minangkabau setia kepada Belanda dan tidak akan menyetujui Belanda dikejar ke laut dengan rakit (De Sumatranenbond, 1920, hal. 15-16).

Akibatnya, sebagian besar aktivitas yang tersisa begitu terintimidasi sehingga gerakan persatuan ini mengalami penurunan drastis. Selain itu, ada pula faktor lain yang turut menyebabkan kemunduran Persatuan Sumatera. Hal ini antara lain sulitnya menentukan lokasi kantor pusat dan minimnya figur yang mewakili seluruh pihak. Lebih lanjut, semakin banyaknya tuntutan reformasi menunjukkan adanya hubungan antara Persatuan Sumatera dengan kelompok nasionalis lainnya di Hindia Belanda. Hal ini menyebabkan organisasi tersebut diawasi secara ketat oleh pemerintah. Lebih lanjut,

keterlibatan Persatuan Sumatera dalam isu-isu lokal: seperti Sarikat Combinatie Minangkabau terhadap persoalan tanah dan otonomi di Minangkabau, mengakibatkan teralihnya perhatian terhadap program-program yang diselenggarakan oleh gerakan Persatuan Sumatera.

Sehingga pada akhirnya, Agustus 1922 dilaporkan bahwa Sarikat Combinatie Minangkabau telah dibubarkan akibat pembahasan Kongres Seluruh Hindia dan pemindahan kursi pengurus utama Persatuan Sumatera dari Batavia ke Padang. Ketika Komite Seluruh Indonesia didirikan, S.C.M. bergabung sebagai anggota dan begitu pula Persatuan Sumatera. Setelah Kongres Persatuan Sumatera yang pertama, disadari bahwa untuk kemajuan yang lebih cepat perlu dilakukan pemindahan pengurus utama Persatuan Sumatera dari Batavia. ke Padang, dimana berbagai perkumpulan pribumi berada di bawah pimpinan umum Sarikat Combinatie Minangkabau. Kepemimpinan tersebut kini diserahkan kepada Pengurus Besar Persatuan Sumatera yang semula berkedudukan di Padang, namun kemungkinan besar akan berkedudukan di Sibolga atau di wilayah lain di Sumatera, bahkan Jawa, jika diperlukan. Berbagai perkumpulan, apapun orientasi dan sifatnya, perkumpulan politik, ekonomi atau pendidikan, dan lain-lain, akan tetap bebas sepanjang menyangkut pengurusnya sendiri dan akan berhubungan langsung dengan pengurus utama Persatuan Sumatera. Namun, dalam hal kepentingan umum, semua asosiasi harus bertindak sebagai satu kesatuan di bawah kepemimpinan manajemen pusat yang disebutkan. Pembubaran S.C.M. didorong oleh semangat kesatuan Sumatera dengan ucapan "*Tuhan beserta kita!*" (De Sarikat Combinatie Minangkabau, 1922, hal. 209-210).

PENUTUP

Sarekat Combinatie Minangkabau (S.C.M.) didirikan pada April 1919. Tujuan perkumpulan ini adalah: memperkuat ikatan timbal balik antara berbagai perkumpulan pribumi; berperan dalam terciptanya ketentraman negara dan memperjuangkan hak-hak sosial dan adat rakyat Minangkabau. Beberapa isu yang diperjuangkan oleh

organisasi ini adalah memperjuangkan tanah ulayat Minangkabau yang kerap disalahgunakan oleh pemerintah; persoalan pemilihan umum dan hak pilih masyarakat Minangkabau; serta persoalan otonomi bagi Minangkabau; serta persamaan kulit putih, coklat serta penghapusan segala perbedaan. Selama kiprahnya, sudah lumrah bahwa suatu organisasi mendapatkan sebuah kritikan yang menghujannya, seperti pihak editor *Oetoesan-Melajoe* yang kerap mengkritik S.C.M.; serta hubungan 'asam manis' S.C.M. dengan Sumatera Thawalib, saling bekerjasama dalam informasi pendidikan masyarakat Minangkabau, namun tetap memiliki persaingan dalam penyebaran pengaruh di masyarakat sebagaimana organisasi pada umumnya.

Beberapa isu yang diperjuangkan oleh Sarikat Combinatie Minangkabau adalah memperjuangkan tanah ulayat Minangkabau yang kerap disalahgunakan oleh pemerintah; persoalan pemilihan umum dan hak pilih masyarakat Minangkabau; serta persoalan otonomi bagi Minangkabau; persamaan kulit putih, coklat serta penghapusan segala perbedaan. Sepanjang masa jabatannya, S.C.M. telah berupaya berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat Minangkabau. Namun, setelah terpilihnya ketua baru, Soelaiman Effendi, faksi-faksi radikal terbentuk di dalam S.C.M, yang menunjukkan orientasi politik yang sejalan dengan *National Indies Partij* (NIP). Pada akhirnya, Agustus 1922 dilaporkan bahwa Sarikat Combinatie Minangkabau telah dibubarkan akibat pembahasan Kongres Seluruh Hindia. S.C.M. bergabung sebagai anggota dan begitu pula Persatuan Sumatera. Berbagai perkumpulan, apapun orientasi dan sifatnya, perkumpulan politik, ekonomi atau pendidikan, dan lain-lain, akan tetap bebas sepanjang menyangkut pengurusnya sendiri dan akan berhubungan langsung dengan pengurus utama Persatuan Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

(1919, 01 01). *Koloniaal tijdschrift*, 8, *TWEDE HALFJAAR*. Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch

Bestuur in Nederlandsch-Indië's-Gravenhage.

BOLSHEVIKS (KAUM MOEDA) ter Sum. Westkust. (1919, 09 05). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(35). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.

De Kaoem Moeda. (1919, 09 13). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(36). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.

DE S.A.A.M. in het Fort de Koek. (1919, 09 05). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(35). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.

Sarikat Combinatie Minangkabau. (1919, 07 26). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(29). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.

Sarikat Combinatie Minangkabau (S.C.M.). (1919, 05 24). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(20). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.

(1920, 08 28). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(34). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.

De Bevolking Ek Haar Bosschen. (1920, 10 02). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(39). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.

De Sumatranenbond. (1920, 12 31). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(52). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.

Erfpachtsperceel K. Baumer In De Volksraad. (1920, 10 02). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(41). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.

(1922, 02 11). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(06). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.

De Sarikat Combinatie Minangkabau. (1922, 08 12). *Overzicht van de Inlandsche en*

- Maleisisch-Chineesche pers*(32). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.
- De Sumatraansche Eenheid. (1922, 05 13). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(19). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.
- Eenheid Van Sumatra. Autonomie Van Indië. (1922, 05 06). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(18). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.
- Kiesrecht. (1922, 05 13). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(19). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.
- Kiesrecht-Meeting Padang Pandjang. (1922, 05 20). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(20). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.
- Redactie En Administratie. (1922, 08 05). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(31). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.
- Sarikat Combinatie Minangkabau. (1922, 05 27). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(21). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.
- Studievereeniging. (1922, 05 20). *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers*(20). Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur.
- Abdullah, T. (2009). *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*. Equinox Publishing.
- Chaniago, D. M., & Humairah, U. R. (2019). Pers dan Perubahan Sosial di Sumatera Barat Awal Abad Ke-XX. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9(17), 14-30. doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.186
- Chaniago, D. M., Humairah, U. R., & Satria, R. (2020). Nasionalisme: Akar dan Pertumbuhannya di Minangkabau. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 10(1), 25-40. doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.293
- Dana, T. (2017). The prolonged decay of the Palestinian National Movement. *National Identities*, 21(1), 39–55. doi.org/10.1080/14608944.2017.1343813
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1980). *Sejarah kebangkitan nasional Sumatera Barat* (Vol. 1). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Freij, H. Y. (1997). Tribal identity and alliance behaviour among factions of the Kurdish national movement in Iraq. *Nationalism and Ethnic Politics*, 3(3), 86–110. doi.org/10.1080/13537119708428512
- Gilley, C. (2017). Beyond Petliura: the Ukrainian national movement and the 1919 pogroms. *East European Jewish Affairs*, 47(1), 45–61.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. (N. Notosusanto, Penerj.) Jakarta: UI Press.
- Jalata, A. (2023). Baro Tumsa's contributions to the Oromo national movement. *Social Identities*, 29(1), 95–121. doi.org/10.1080/13501674.2017.1306403
- Johnston, H. (2008). Ritual, strategy, and deep culture in the Chechen national movement. *Critical Studies on Terrorism*, 1(3), 321–342. doi.org/10.1080/17539150802514981
- Kahin, A. (1984). Repression and Regroupment: Religious and Nationalist Organizations in West Sumatra in the 1930s. *Indonesia* 38, 39-54. doi.org/10.2307/3350844
- Kahin, A. (2008). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kahn, J. S. (1980). *Minangkabau social formations, Indonesian peasants and the world-economy*. (J. Goody, Penyunt.) London: Cambridge University Press.
- Khalidi, R., & Samour, S. (2011). *Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the Palestinian National Movement*.

- Journal of Palestine Studies*, 40(2), 6–25.
doi.org/10.1525/jps.2011.xl.2.6
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Landsberger, H. A., & Alexandrov, Y. G. (1984). *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Livia, E. (2015). MTKAAM dan Keterlibatannya dalam Perpolitikan Daerah Sumatera Barat Tahun 1937-1966. Thesis Universitas Andalas.
- Lockman, Z. (1988). The social roots of nationalism: workers and the national movement in Egypt, 1908–19. *Middle Eastern Studies*, 24(4), 445–459.
doi.org/10.1080/00263208808700756
- Marzali, A. (2020). Pemberontakan Komunis Silungkang 1926-1927 Sebuah Gerakan Islam Revolusioner. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 10(1), 59-84.
doi.org/10.17510/paradigma.v10i1.394
- Noer, D. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nurfathiha, T. (2022). *Jong Sumatranen Bond Cabang Padang Dalam Gerakan Nasionalisme (1918-1930)*. Skripsi Universitas Negeri Jakarta.
- Rose, L. C. (1975). *Turkish Diplomacy 1918–1923: Mustafa Kemal and the Turkish National Movement: Sonyel, Salahi Ramsdan: (Sage Studies in 20th Century History Vol. 3)* Beverly Hills: Sage Publications 267 Pp., Publication Date: May 1975. *History: Reviews of New Books*, 4(1), 10.
doi.org/10.1080/03612759.1975.9945178
- Sethi, R. (1996). Contesting Identities: Involvement and resistance of women in the Indian National Movement. *Journal of Gender Studies*, 5(3), 305–315.
doi.org/10.1080/09589236.1996.9960652
- Siddiqi, F. (2010). Nation-formation and national movement(s) in Pakistan: a critical estimation of Hroch's stage theory. *Nationalities Papers*, 38(6), 777–792.
doi.org/10.1080/00905992.2010.515974
- Sunarti, S. (2015). Suara-Suara Islam dalam Surat Kabar dan Majalah Terbitan Awal Abad 20 di Minangkabau. *Buletin Al-Turas* 21(2), 113-124.
doi.org/10.15408/bat.v21i2.3839
- Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403-416.
doi.org/10.24127/hj.v6i2.1531
- Zed, M. (2009). *Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial)*. Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.